J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6,Oktober 2024

Implementasi Kebijakan Administrasi Pemerintahaan Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa

Jeane Mantiri[1], Vanesha Sumolang[2], Recky H.E. Sendouw[3]
[1,2,3]Fakultas Ilmu,Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado
E-mail: jeanelitha@unima.ac.id[1], vaneshasumolang@gmail.com[2], reckysendouw@unima.ac.id[3]

Article History:
Received: 12 Oktober 2024
Revised: 28 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

Keywords: *Implementasi Kebijakan,Administrasi Umum,Pengawasan Pemerintahan Desa*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Wolang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi umum adalah implementasi dari Kebijakan Administrasi Pemerintahan Desa di Wolang, Kecamatan Langowan Timur. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa tantangan, yaitu: 1) Kurangnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan administrasi pemerintahan desa, khususnya administrasi umum, oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan. 2) Masih rendahnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab aparat desa, terutama terkait profesionalisme mereka. 3) Kepala Desa kurang tegas dalam menjalankan tugasnya. 4) Belum adanya prosedur operasional standar (SOP) dalam pengelolaan operasional pemerintahan saat ini.*

PENDAHULUAN

Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, kekuasaan mengendalikan dan mengurus urusan pemerintahan, serta kemampuan mewakili kepentingan masyarakat setempat melalui prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. dan dihormati dalam susunan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Ichsan Kabullah & Fajri, 2021; Muhtada et al., 2022; Permatasari et al., 2021; Pickel-Chevalier et al., 2021).

Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang membantu aparat dan perangkat Pemerintah Desa di dalam proses pencatatan data dan informasi berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sangat diharapkan supaya kegiatan dalam pengelolaan administrasi desa lebih efektif dan efisien. Selama ini, masyarakat menganggap bahwa administrasi dihubungkan dengan tata usaha dan keuangan, namun sebenarnya administrasi tidak hanya mencakup mengenai itu saja (Ardilafiza et al., 2021; Lestari et al., 2019; Nurrochmat et al., 2021; Nurwulandari, 2023).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor

47 Tahun 2016 adalah keseluruhan proses pemasukan data dan informasi pemerintahan desa ke dalam buku Daftar Desa. Pengertian Administrasi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: a) Administrasi Umum; b) Administrasi Keuangan; c) Administrasi Kependudukan; d) Administrasi Pembangunan; dan e) Administrasi Lainnya (Bahasoan et al., 2024; Nurrochmat et al., 2021; Syukri, 2023; Wati et al., 2019).

Pengelola pemerintahan desa perlu memiliki pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat menyelenggarakan pemerintahan desa secara efektif. Mereka juga perlu menyadari tanggung jawab, nilai-nilai, dan keuntungan mereka. Hal ini akan menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan benar dan tanpa kesalahan (Arai et al., 2021; Arifin et al., 2020; Junus et al., 2023; Sari et al., 2019; Wiati et al., 2022).

Pemerintah kabupaten dan bahkan kecamatan mempunyai peran penting dalam situasi ini dalam hal sosialisasi, pemberian petunjuk dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pemantauan dan pembinaan, serta pemberian konsultasi, supervisi, dan bimbingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi pemerintahan, khususnya di bidang administrasi umum serta peran BPD dalam mengawasi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa.Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kecamatan tetap memegang peranan penting dalam pembinaan, pengawasan, bahkan konsultasi penyelenggaraan (Herawati & Sunjaya, 2022; Indra & Khoirunurrofik, 2022; Irawan et al., 2019; Nurwulandari, 2023; Odagiri et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa dari sepuluh buku yang ada pada administrasi umum, hanya tiga buku yang ada di tempat yaitu buku peraturan desa, buku keputusan kepala desa, buku inventarisasi dan kekayaan desa. Dan ketiga buku tersebut didapati masih kosong atau belum terisi. Maka dalam hal ini profesionalisme aparatur di Desa Wolaang masih sangat rendah. Temuan studi ini menunjukkan bahwa beberapa pemerintah desa terus mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kewajibannya, BPD serta pemerintah kabupaten dan kecamatan, kurang memberikan pengawasan terhadap penerapan kebijakan administrasi umum, Perangkat desa saat ini, khususnya Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang berkomunikasi dengan baik satu sama lain (Berenschot & Mulder, 2019; Luthfiani et al., 2020; Shoesmith et al., 2020).

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Administrasi Pemerintahan Desa Wolaang Kec.Langowan Timur Kab.Minahasa dengan memperhatikan acuan penelitian pada “Permendagri. No.47 Tahun 2016 tentang “Administrasi Pemerintahan Desa”.Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut: Secara teoritis, berharap bisa meningkatkan nilai tambah bagi perkembangan Ilmu Sosial agar dapat dijadikan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperbanyak informasi mengenai “Implementasi Kebijakan Administrasi Pemerintahan Desa”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami kondisi yang melekat pada objek penelitian secara mendalam. Metode kualitatif merupakan pendekatan yang memungkinkan peneliti mengamati fenomena secara alami, tanpa melakukan eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, yang berinteraksi langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh data yang autentik dan relevan (Dado et al.,

2023; Denny & Weckesser, 2022; Mustafa, 2021; Nurman et al., 2022).

Lokasi penelitian ini berada di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa. Fokus penelitian dibatasi pada Kebijakan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa. Fokus utama penelitian ini mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi dalam kaitannya dengan kesesuaiannya terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu penggunaan beberapa metode secara kombinasi untuk memastikan keakuratan informasi. Sedangkan untuk analisis data, digunakan pendekatan induktif, yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola atau tema yang muncul dari data (Cascio et al., 2019; Lemon & Hayes, 2020; O'Kane et al., 2021; Sibeoni et al., 2020).

Dalam Teknik pengumpulan data, peneliti melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa. Selain itu, wawancara dilakukan untuk mempertemukan dua orang dalam rangka bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga makna dari suatu topik dapat dikonstruksikan secara mendalam. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi foto, video, sketsa, serta karya seni lainnya, seperti patung dan film.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sebagai metode analisis data, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sekaligus memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data dengan memadukan berbagai teknik pengumpulan data yang saling mendukung (Farquhar et al., 2020; FitzPatrick, 2019; Hayashi et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dedikasi seluruh pemimpin daerah merupakan indikasi pertama akan hal ini. Untuk menciptakan sistem administrasi yang komprehensif dan tepat, keberhasilan tersebut dimulai dengan terciptanya perencanaan desa yang baik, yang kemudian didukung oleh data dan informasi yang andal.Ketersediaan literatur pemerintahan desa, seperti publikasi tentang administrasi pembangunan, administrasi kependudukan, administrasi umum, dan topik lainnya, merupakan langkah awal menuju terbentuknya struktur administrasi yang tertib.

Oleh karena itu, perlu dikaji permasalahan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan desa di Desa Wolaang, khususnya yang berkaitan dengan administrasi umum. Hasil penelitian lapangan yang ditemukan peneliti adalah kebijakann penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa efektivitas proses ditentukan oleh empat indikator dalam implementasi kebijakan publik. Kerja lapangan para peneliti menjadi landasan bagi kesimpulan ini. Khususnya: 1) Sikap dan Perilaku, 2) Materi, 3) Interaksi, dan 4) Kerangka/struktur Organisasi (Budi et al., 2020; Kamil et al., 2021).

Tiga aspek penting dalam proses komunikasi kebijakan: kejelasan, konsistensi, dan transmisi. Edward III menegaskan bahwa mengetahui apa yang harus dilakukan merupakan prasyarat pertama bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh mereka yang melaksanakan keputusan. Sebelum ditindaklanjuti, kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Komunikasi yang akurat sangat penting, dan pelaksana perlu memahaminya secara menyeluruh (Grzywacz, 2020; McRae, 2019; Santika et al., 2020).

Berdasarkan indikator pertama, komunikasi, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Langowan Timur telah melaksanakan kebijakan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa hingga pengawasan dan pemantauan. Kebijakan-kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara rutin, namun komunikasi dalam hal ini telah dilakukan melalui sosialisasi tujuan kebijakan. Namun, mereka yang ditugaskan untuk menerapkan kebijakan ini yakni pejabat desa saat ini belum terlalu memikirkan atau memahami kebijakan tersebut.

Sumber daya juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap kebijakan pada indikasi kedua dalam contoh ini, kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa. Peneliti menemukan bahwa pegawai, dalam hal ini perangkat desa saat ini, kurang memahami betul peran dan tugas mereka sebagai perangkat desa dalam menjalankan peraturan pemerintahan desa di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa. Baik pengurus umum maupun sekretaris desa dalam hal ini kurang menyadari perannya masing-masing dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Selain itu, karena keterbatasan sumber daya dalam hal ini infrastruktur dan fasilitas gedung kantor desa baru mulai beroperasi. Akibatnya penyelenggaraan pemerintahan desa belum sepenuhnya berjalan dan efektif. karena rumah kepala desa dulunya berfungsi sebagai kantor desa. Agar implementasi kebijakan dapat berhasil secara efektif dan efisien, pihak yang melaksanakan implementasi tersebut tidak hanya harus mampu menjalankan kebijakan tersebut dan mengetahui apa yang harus dilakukan, namun juga harus mampu melaksanakan kebijakan tersebut. mereka juga perlu dimotivasi untuk melakukannya

Peneliti menyimpulkan bahwa indikator disposisi dalam hal ini adalah seluruh komponen pemerintahan desa telah menerima dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam hal ini kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan penelitian yang ditemukan. Hanya saja perangkat yang ada saat ini kurang memiliki dedikasi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. serta kurangnya keteguhan pimpinan dalam contoh ini, kepala desa.

Organisasi yang umumnya paling sering melaksanakan kebijakan adalah birokrasi. Untuk mengatasi permasalahan sosial dalam kehidupan masa kini, birokrasi baik sengaja maupun tidak sengaja memilih bentuk organisasi untuk mencapai konsensus kolektif. Mereka ditemukan tidak hanya di struktur pemerintahan tetapi juga di organisasi swasta dan lembaga pendidikan lainnya. Kadang-kadang, sistem birokrasi sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu kebijakan tertentu.
Peneliti mengambil kesimpulan bahwa struktur birokrasi desa wolaang belum memiliki standar oprasional (SOP) pelaksanaan peraturan adminisstrasi pemerintah desa berdasarkan indicator struktur birokrasi yang peneliti temukan selama penelitian ini. Dengan demikian, terbukti bahwa pengelolaan administrasi pemerintahan masih belum aktif sepenuhnhya efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari sepuluh buku administrasi yang seharusnya ada, hanya tiga yang tersedia, yaitu buku peraturan desa, buku keputusan kepala desa, dan buku inventarisasi serta kekayaan desa. Komunikasi kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten dan kecamatan, belum dilaksanakan secara rutin, sehingga kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh para perangkat desa. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya profesionalisme

dan pemahaman perangkat desa terkait peran dan tanggung jawab mereka.

Dari segi sumber daya, implementasi kebijakan administrasi pemerintahan desa di Desa Wolaang masih terkendala oleh keterbatasan keterampilan dan kemampuan perangkat desa dalam mengelola buku desa dan administrasi umum. Selain itu, kantor desa yang baru beroperasi masih memiliki keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung, sehingga tugas-tugas administratif belum dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam hal disposisi sikap, meskipun seluruh komponen pemerintahan desa telah mengakui dan mendorong penerapan kebijakan administrasi pemerintahan desa, terdapat kurangnya dedikasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Kurangnya ketegasan kepala desa sebagai pemimpin juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan ini.

Di sisi lain, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wolaang menyebabkan pengelolaan administrasi pemerintahan desa masih belum efektif. Hal ini menunjukkan bahwa SOP memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, yang masih memerlukan perhatian lebih untuk memastikan administrasi desa dapat berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan.

DAFTAR REFERENSI

Arai, Y., Maswadi, M., Oktoriana, S., Suharyani, A., Didik, D., & Inoue, M. (2021). How Can We Mitigate Power Imbalances in Collaborative Environmental Governance? Examining the Role of the Village Facilitation Team Approach Observed in West Kalimantan, Indonesia. *Sustainability*, *13*(7), 3972. https://doi.org/10.3390/su13073972

Ardilafiza, Warman, K., Illahi, B. K., & Tegnan, H. (2021). Ancient Sites, History and Local Wisdom: Tourism Boosting Reforms to Improve the Economy and Living Standard in the Province of Bengkulu, Indonesia. *Ancient Asia*, *12*. https://doi.org/10.5334/aa.235

Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djunedi, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, *79*, 382–394. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052

Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *8*(1), 43. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119

Berenschot, W., & Mulder, P. (2019). Explaining regional variation in local governance: Clientelism and state-dependency in Indonesia. *World Development*, *122*, 233–244. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.021

Budi, N. F. A., Fitriani, W. R., Hidayanto, A. N., Kurnia, S., & Inan, D. I. (2020). A study of government 2.0 implementation in Indonesia. *Socio-Economic Planning Sciences*, *72*, 100920. https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100920

Cascio, M. A., Lee, E., Vaudrin, N., & Freedman, D. A. (2019). A Team-based Approach to Open Coding: Considerations for Creating Intercoder Consensus. *Field Methods*, *31*(2), 116–130. https://doi.org/10.1177/1525822X19838237

Dado, M., Spence, J. R., & Elliot, J. (2023). The Case of Contradictions: How Prolonged Engagement, Reflexive Journaling, and Observations can Contradict Qualitative Methods. *International Journal of Qualitative Methods*, *22*. https://doi.org/10.1177/16094069231189372

Denny, E., & Weckesser, A. (2022). How to do qualitative research? *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, *129*(7), 1166–1167. https://doi.org/10.1111/1471-0528.17150

Farquhar, J., Michels, N., & Robson, J. (2020). Triangulation in industrial qualitative case study research: Widening the scope. *Industrial Marketing Management*, *87*, 160–170. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.02.001

FitzPatrick, B. (2019). Validity in qualitative health education research. *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, *11*(2), 211–217. https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.11.014

Grzywacz, A. (2020). Indonesia's (inter)national role as a Muslim democracy model: effectiveness and conflict between the conception and prescription roles. *The Pacific Review*, *33*(5), 728–756. https://doi.org/10.1080/09512748.2019.1585387

Hayashi, P., Abib, G., & Hoppen, N. (2019). Validity in Qualitative Research: A Processual Approach. *The Qualitative Report*. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2019.3443

Herawati, D. M. D., & Sunjaya, D. K. (2022). Implementation Outcomes of National Convergence Action Policy to Accelerate Stunting Prevention and Reduction at the Local Level in Indonesia: A Qualitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(20), 13591. https://doi.org/10.3390/ijerph192013591

Ichsan Kabullah, M., & Fajri, M. N. (2021). Neo-Ibuism in Indonesian Politics: Election Campaigns of Wives of Regional Heads in West Sumatra in 2019. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *40*(1), 136–155. https://doi.org/10.1177/1868103421989069

Indra, J., & Khoirunurrofik, K. (2022). Understanding the role of village fund and administrative capacity in stunting reduction: Empirical evidence from Indonesia. *PLOS ONE*, *17*(1), e0262743. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262743

Irawan, S., Widiastomo, T., Tacconi, L., Watts, J. D., & Steni, B. (2019). Exploring the design of jurisdictional REDD+: The case of Central Kalimantan, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, *108*, 101853. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.12.009

Junus, D., Nuna, M., Hunawa, R., Sahi, N. A., & Tumuhulawa, A. (2023). GOOD VILLAGE GOVERNANCE DI DESA AYUMOLINGO. *Governance*, *11*(1), 51–62. https://doi.org/10.33558/governance.v11i1.5896

Kamil, I., Abdoellah, O. S., Agustin, H., & Bakti, I. (2021). Dialectic of Environmental Communication in Indonesian Conservation Area. *Environmental Communication*, *15*(2), 203–217. https://doi.org/10.1080/17524032.2020.1819362

Lemon, L., & Hayes, J. (2020). Enhancing Trustworthiness of Qualitative Findings: Using Leximancer for Qualitative Data Analysis Triangulation. *The Qualitative Report*. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2020.4222

Lestari, W., Azwardi, A., & Siddik, S. (2019). Can Internal Control Prevent Fraud in Managing Village Funds? *Accounting and Finance*, *4(86)*, 112–118. https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-4(86)-112-118

Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(7), 1886. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p20

McRae, D. (2019). Indonesia's South China Sea Diplomacy: A Foreign Policy Illiberal Turn? *Journal of Contemporary Asia*, *49*, 1–21. https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1601240

Muhtada, D., Suhadi, S., Zaidi, I., & Alkhair, R. (2022). The protection of civil rights for the Shi'ite refugees of Sampang, East Java: a systemic governance approach to restore the refugees' Rights. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, *12*(2), 231–256.

https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.231-256

Mustafa, C. (2021). Qualitative Method Used in Researching the Judiciary: Quality Assurance Steps to Enhance the Validity and Reliability of the Findings. *The Qualitative Report*. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4319

Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of Pluralism Education in Indonesia: A Qualitative Study. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, *9*(3), 106–120. https://doi.org/10.29333/ejecs/1207

Nurrochmat, D. R., Pribadi, R., Siregar, H., Justianto, A., & Park, M. S. (2021). Transformation of Agro-Forest Management Policy under the Dynamic Circumstances of a Two-Decade Regional Autonomy in Indonesia. *Forests*, *12*(4), 419. https://doi.org/10.3390/f12040419

Nurwulandari, A. (2023). The Effectiveness of Village Financial Management in Sukabakti village, Tambelang District, Bekasi Regency. *Journal of Economics and Business (JECOMBI)*, *3*(03), 125–131. https://doi.org/10.58471/jecombi.v3i03.59

O'Kane, P., Smith, A., & Lerman, M. P. (2021). Building Transparency and Trustworthiness in Inductive Research Through Computer-Aided Qualitative Data Analysis Software. *Organizational Research Methods*, *24*(1), 104–139. https://doi.org/10.1177/1094428119865016

Odagiri, M., Cronin, A. A., Thomas, A., Kurniawan, M. A., Zainal, M., Setiabudi, W., Gnilo, M. E., Badloe, C., Virgiyanti, T. D., Nurali, I. A., Wahanudin, L., Mardikanto, A., & Pronyk, P. (2020). Achieving the Sustainable Development Goals for water and sanitation in Indonesia – Results from a five-year (2013–2017) large-scale effectiveness evaluation. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, *230*, 113584. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2020.113584

Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals. *Sustainability*, *13*(21), 12294. https://doi.org/10.3390/su132112294

Pickel-Chevalier, S., Bendesa, I. K. G., & Darma Putra, I. N. (2021). The integrated touristic villages: an Indonesian model of sustainable tourism? *Tourism Geographies*, *23*(3), 623–647. https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1600006

Santika, W. G., Urmee, T., Simsek, Y., Bahri, P. A., & Anisuzzaman, M. (2020). An assessment of energy policy impacts on achieving Sustainable Development Goal 7 in Indonesia. *Energy for Sustainable Development*, *59*, 33–48. https://doi.org/10.1016/j.esd.2020.08.011

Sari, D. A., Sayer, J., Margules, C., & Boedhihartono, A. K. (2019). Determining the effectiveness of forest landscape governance: A case study from the Sendang landscape, South Sumatra. *Forest Policy and Economics*, *102*, 17–28. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.014

Shoesmith, D., Franklin, N., & Hidayat, R. (2020). Decentralised Governance in Indonesia's Disadvantaged Regions: A Critique of the Underperforming Model of Local Governance in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *39*(3), 359–380. https://doi.org/10.1177/1868103420963140

Sibeoni, J., Verneuil, L., Manolios, E., & Révah-Levy, A. (2020). A specific method for qualitative medical research: the IPSE (Inductive Process to analyze the Structure of lived Experience) approach. *BMC Medical Research Methodology*, *20*(1), 216. https://doi.org/10.1186/s12874-020-01099-4

Syukri, M. (2023). Gender Policies of the new Developmental State: The Case of Indonesian new

Participatory Village Governance. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *42*(1), 110–133. https://doi.org/10.1177/18681034221149750

Wati, F., Mursyidin, M., & Hajad, V. (2019). Indomaret Milik Siapa? Implementasi dan Peminggiran Pedagang Kecil dalam Praktek Pemberian Izin Mendirikan Toko Modern di Meulaboh. *Jurnal Public Policy*. https://doi.org/10.35308/JPP.V5I2.1102

Wiati, C. B., Dharmawan, I. W. S., Sakuntaladewi, N., Ekawati, S., Wahyuni, T., Maharani, R., Hadiyan, Y., Naibaho, Y., Satria, W. I., Ngatiman, N., Abdurachman, A., Karmilasanti, K., Laksmita, A. N., Angi, E. M., & Khadka, C. (2022). Challenges to and Strategies for the Climate Village Program Plus: A Lesson Learned from Indonesia. *Sustainability*, *14*(9), 5530. https://doi.org/10.3390/su14095530